

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Liza Putri Andini
181010017**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Liza Putri Andini
181010017**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Liza Putri Andini
Npm : 181010017
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi. Ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam Skripsi. Ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia naskah Skripsi. Ini digugurkan dan Skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 01 Agustus 2022



Liza Putri Andini
181010017

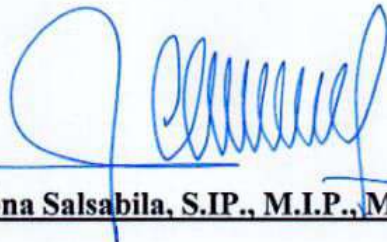
**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Oleh:
Liza Putri Andini
181010017**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 01 Agustus 2022



Lubna Salsabila, S.IP., M.I.P., M.PA.

Pembimbing



Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan lingkungan yang bersih perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dalam menjaga kebersihan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan lingkungan yang bersih pemerintah melakukan sosialisasi mengenai pembuangan sampah kepada masyarakat yang disebarakan melalui slogan-slogan dan media sosial. Hal ini dilakukan untuk menghimbau masyarakat agar menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terkena penyakit. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Batam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pengelolaan sampah belum terimplementasi dengan baik dikarenakan pengangkutan sampah seringkali mengalami kendala karena keterbatasan armada dan sumber daya. Selain itu, armada pengangkutan sampah juga seringkali mengalami kerusakan sehingga pengangkutan sampah sering tertunda. Tidak hanya itu, armada yang disediakan untuk mengangkut sampah berukuran kecil yang hanya bisa mengangkut 3-4 ton sampah saja per-tripnya sedangkan sampah yang harus diangkut per-tripnya lebih dari 4 ton. Selain itu, agar sampah yang ada di TPS bisa terangkut semua ke TPA petugas memerlukan waktu dari pagi hingga malam untuk pengangkutan sampah karna keterbatasan armada. Kemudian, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli dengan kebersihan lingkungan. Padahal sudah ada himbauan dari pemerintah mengenai pembuangan sampah pada tempatnya namun, masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Sampah, Kebersihan

ABSTRACT

The efforts of the Environment Agency in realizing a clean environment need to be carried out by collaboration between the government and the community in maintaining cleanliness. Therefore, to create a clean environment, the government conducts socialization regarding waste disposal to the public which is disseminated through slogans and social media. This is done to urge the public to maintain cleanliness by not littering so as not to get sick. This study uses descriptive qualitative research which aims to provide an understanding of the implementation of Regional Regulation Number 11 of 2013 concerning Waste Management in Batam City. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. The results of this study can be concluded that the implementation of waste management has not been implemented properly because waste transportation often experiences problems due to limited fleet and resources. In addition, the waste transportation fleet is also often damaged, so that waste transportation is often delayed. Not only that, the fleet provided to transport small-sized waste can only transport 3-4 tons of waste per trip, while the waste that must be transported per trip is more than 4 tons. In addition, so that all the waste in the TPS can be transported to the TPA, the officers need time from morning to night to transport the waste due to the limited fleet. Then, there is still a lack of public awareness to care about environmental cleanliness. Even though there has been an appeal from the government regarding waste disposal in its place, however, there are still people who throw garbage carelessly.

Keywords: *Implementation, Waste Management, Cleanliness*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb Puji syukur atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (SI) pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Efi Husda S.Kom, M.SI. sebagai Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP, M.AP. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam
3. Ibu Lubna Salsabila, S.IP., M.I.P., M.PA. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis di Universitas Putera Batam.
4. Bapak Timbul Dompok S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing akademik penulis di Unversitas Putera Batam
5. Segenap Dosen jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
6. Segenap Dosen dan Staff Universitas Putera Batam
7. Seluruh anggota serta staff Dinas Lingkungan Hidup yang telah memberikan izin penelitiannya kepada Peneliti.
8. Kepada kedua orang tua Tercinta, Bapak Asdiman dan Ibu Lasmawati yang selalu memberikan semangat serta Doanya yang tiada henti dipanjatkan kepada Allah SWT, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta kakak tercinta Fera FitriAni yang selalu memberikan semangat serta selalu memberikan dorongan motivasi untuk penulis. Serta adek tercinta A. Deden Egeh Saputra, dan adek kedua Aldercy Suci Ardela yang selalu membuat keceriaan kepada penulis.
10. Serta sahabat terkasih, Rahmat Setia Laoli, Novi Syafitri, Muhammad Rasyid, Laura Kristiani, Kristin Angelina, Naili Izza, Gita Mahmud, Mahadalena, Riski TriPrasetio. Serta penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat tercinta Karmila yang selalu memberikan Support System, serta partner tercinta yang selalu mendoakan dan memberi dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kepada Senior dan Alumni prodi Administrasi Negara yang telah memberikan masukan, saran, motivasi serta memberikan informasi dan pengalamannya kepada penulis.
12. Rekan mahasiswa Unversitas Putera Batam Program Studi Administrasi Negara angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini secara langsung maupun tidak.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta dapat dikembangkan lebih lanjut.

Batam, 01 Agustus 2022



Liza Putri Andini

181010017



Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Masalah	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Kebijakan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan	7
2.1.1 Pembangunan berkelanjutan	8
2.1.2 Tahapan Kebijakan Publik	9
2.1.3 Jenis Kebijakan Publik	11
2.1.4 Implementasi Kebijakan	12
2.1.5 Model Implementasi Kebijakan	13
2.1.6 Indikator Implementasi Menurut George C. Edward III.....	17
2.1.7 Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Implementasi.....	20
2.2 Sampah sebagai masalah Pemerintah Daerah	21
2.2.1 Pengelolaan Sampah	22
2.3 Sampah dan Tata Kelola perkotaan	22
2.3.1 Manajemen Sampah saat ini.....	23
2.3.2 Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam	24
2.4 Penelitian Terdahulu.....	26
2.5 Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Sifat Penelitian	34
3.3 Lokasi Penelitian dan Periode Penelitian	35
3.4 Sumber Data	35
3.5 Metode Pengumpulan Data	36
3.6 Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40

4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	40
4.1.2 Sumber Daya Manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	44
4.1.3 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam	48
4.2 Pembahasan	66
4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam	66
4.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1 Simpulan.....	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	78
Lampiran I Pendukung Penelitian	
Lampiran II Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran III Surat Keterangan Penelitian	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik (Batubara & Manurung, 2020)	9
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	33
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi DLH Kota Batam	41
Gambar 4.2 Jumlah penduduk Kota Batam Tahun 2000-2020	47
Gambar 4.3 Satuan Tugas Pengelolaan Persampahan Kota Batam	49
Gambar 4.4 Pengarahan sistem pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup	52
Gambar 4.5 Armada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020	55

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Jumlah Sampah Rumah Tangga 2018-2020	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Tabel Periode Penelitian	35
Tabel 3. 2 Daftar Narasumber Penelitian	36
Tabel 4.1 Data Teknis TPA Telaga Punggur	45



Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat di dunia, pada tahun 2021, penduduk Indonesia tercatat sebanyak 272.229.372 jiwa (Zudan, 2021). Salah satu provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Batam, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.055.278 jiwa. Jumlah ini terus mengalami peningkatan sebesar 1.08 persen atau 22.098 jiwa dibandingkan pada tahun 2020. Kota Batam memiliki penduduk sebanyak 1169.649 jiwa (Infopublik, 2021).

Kepadatan penduduk di Kota Batam tak jarang menyebabkan beberapa masalah. Salah satunya ialah terkait dengan jumlah sampah rumah tangga yang terus meningkat setiap harinya, namun tidak diiringi dengan pengadaan truk maupun bin sampah baru (HaluanKepri, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Sisa padat kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam disebut sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan penanganan dan pengurangan sampah (Salsabila, 2020). Penanganan sampah yang tidak dilakukan secara cepat dan tanggap dapat memberikan efek buruk bagi masyarakat, seperti sampah dapat menjadi penyebab yang sangat buruk bagi lingkungan mahluk hidup dan sumber penyakit.

Tugas dan wewenang Pemerintah Kota Batam dalam pengelolaan sampah pasal 6 Nomor 11 tahun 2013 menjelaskan bahwa tugas pemerintah Kota Batam melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, untuk upaya tersebut belum terlaksana dengan baik karena masih banyak dikalangan masyarakat yang belum mendapatkan prasarana dan sarana yang memadai dari Pemerintah Kota Batam. Contohnya dapat diambil dari Kecamatan Sagulung dan Batu Ampar Jodoh, masyarakat setempat menjelaskan bahwa dikecamatan tempat mereka tinggal kurang nya truk sampah yang mengakibatkan penumpukan sampah (Heryanto, 2021).

Tabel 1.1 Data Jumlah Sampah Rumah Tangga 2018-2020

No	Tahun	JUMLAH SAMPAH (KG)			
		Industri/Rumah Tangga	DLH	Lain	Jumlah
1	2018	37.992.370	234.959.330	-	272.951.700
2.	2019	46.898.970	247.368.120	-	294.267.090
3.	2020	42.553.250	244.834.150	1,786,630	289.174.030

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam (2020)

Pada data yang diatas menunjukkan bahwa sampah yang paling banyak diproduksi berasal dari rumah tangga dan industri. Contohnya sampah sisa makan. Sedangkan sampah yang diangkut oleh armada pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak seimbang dengan sampah yang diproduksi dari *industry*/rumah tangga. Sampah yang dimaksud dari sampah lain adalah sampah yang berasal dari hasil gotong royong, puing bangunan dan lainnya. Dari data tersebut penulis dapat menilai bahwa sampah yang sering tertimbun merupakan sampah yang jangka

waktunya cepat membusuk dan terurai sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan aroma tak sedap dan binatang yang mengurai sampah akan semakin bertambah banyak kecuali plastik.

Sampah masih menjadi persoalan di Kota Batam. Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di wilayah Sagulung, kerap penuh dengan tumpukan sampah tepatnya TPS Simpang Nato. Adanya tumpukan sampah mengganggu kenyamanan para pengendara yang melintas karena aroma bau yang menyengat. Dilansir dari Tribun Batam, tumpukan sampah yang ada di kecamatan Sagulung terjadi karena lambatnya pergantian *bin* kontainer sampah. (TribunBatam, 2020).

Hal serupa juga ditemukan di Kecamatan Batu Ampar tepatnya di ruas Jalan Duyung sekitar pusat perbelanjaan TOP 100 Jodoh. Terjadi tumpukan sampah selama sepekan sehingga menimbulkan bau yang menyengat. Sampah yang menumpuk di area ini merupakan sampah sisa dari pedagang sekitar. Karena minimnya tempat sampah di setiap lokasi, ruang tersebut tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan (TribunBatam.id, 2021).

Butuh penanganan yang serius agar penimbunan sampah tidak berlarut-larut dan menjadi tradisi baru dikalangan masyarakat. Berdasarkan data dari Infografis Bidang Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2020, presentase pengangkutan sampah di Kota Batam tahun 2020 hanya sebesar 79,54 persen artinya masih ada 20,46 persen sampah yang belum ditangani (Kominfo.batam.go.id, 2020).

Menurut survei yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat, ada banyak tumpukan sampah yang tidak terkendali di kawasan Batu Aji Batam. Banyak warga yang tidak dapat memanfaatkan kembali sampahnya, seperti melalui daur

ulang atau penciptaan nilai ekonomi yang bermanfaat. Budaya pengelolaan sampah warga ini masih belum optimal. Upaya pengelolaan sampah, misalnya, belum dioptimalkan untuk mengubah sampah menjadi nilai yang bernilai. Perencanaan pengolahan sampah yang belum optimal, mengakibatkan sistem pengelolaan sampah yang kurang ideal (Sumantika & Siyamto, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemanfaatan lingkungan yang berdaya saing berbasis pengelolaan sampah dengan metode 3R. Pendekatan 3R adalah proses tiga langkah yang melibatkan pengurangan limbah, penggunaan kembali limbah untuk nilai yang lebih tinggi (*reuse*), dan daur ulang limbah menjadi produk komersial (*recycle*).

Penimbunan sampah seharusnya dapat dicegah jika ada kerja sama antar masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sampah ini. Hal ini sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah tepatnya pada Pasal 3 dimana dijelaskan bahwa dalam mencapai lingkungan bersih, hijau dan nyaman harus dimiliki oleh rasa kepedulian masyarakat dan pemerintah dalam menangani sampah di lingkungan sekitar. Tentu saja ini menjadi motivasi masyarakat untuk menjadikan lingkungan yang asri. Dalam hal ini, beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam untuk mengurangi jumlah sampah rumah tangga. Salah satunya ialah dengan mengelolanya menjadi barang yang mempunyai nilai. Karya seni yang memiliki nilai, botol bekas dapat diubah menjadi pot bunga. Tujuan program ini selain untuk menciptakan lingkungan yang bersih juga mengurangi angka pengangguran di kalangan masyarakat dengan berbisnis daur ulang sampah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam**”.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah di buat agar peneliti lebih mendalami masalah-masalah yang telah ada di dalam identifikasi masalah tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas maka dalam penelitian ini, peneliti merumuskan dua rumusan masalah yakni:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam?
2. Apa faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam?

1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Adapun tujuan penelitan ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Batam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam.

2. Faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis, adalah:

1. Teoritis untuk digunakan keilmuaan Administrasi Publik khususnya dalam Kebijakan Publik manajemen sampah.
2. Praktis Dapat dijadikan masukan bagi pemerintah, pelaksana dalam mengimplementasi Pengelolaan Sampah di Kota Batam.



Universitas Putera Batam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Dunn dalam Anggara, (2014), kebijakan publik adalah serangkaian pilihan-pilihan yang saling berkaitan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan pada tiap bidang yang berhubungan dengan tugas pemerintah, seperti pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. Selain itu, dalam konteks negara yang demokratis, petugas pemerintah maupun pejabat-pejabatnya dipilih menurut prinsip-prinsip demokratis. Kebijakan pada umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk memperat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat (Anggara, 2014).

Kebijakan dibuat secara eksklusif untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang akan berkembang; namun, istilah kebijakan sering digunakan secara berlebihan untuk merujuk pada perilaku institusional atau kepentingan pribadi yang berbeda dari aktivitas politik yang buruk. Karakter utama dari kebijakan publik yaitu :1) Kebijakan tentunya harus berdampak dan berupaya memecahkan masalah yang dimiliki publik (Hamdi, 2014). Setiap kebijakan bertujuan untuk memecahkan dan mengatasi permasalahan yang akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah solusi untuk tujuh masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh warga negara

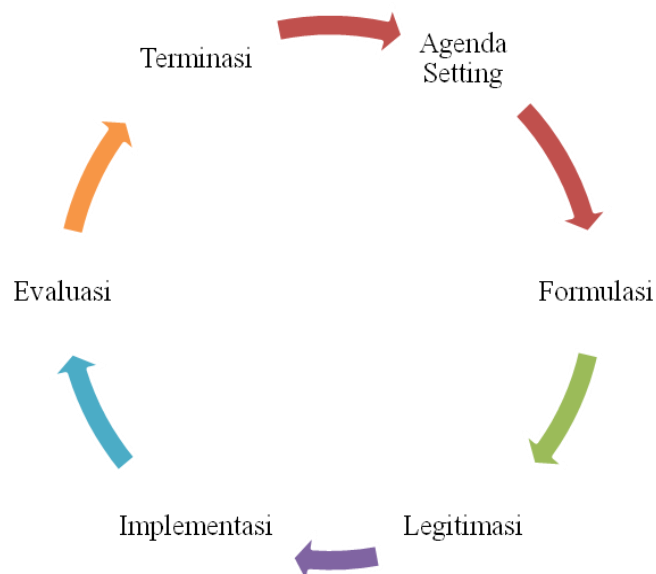
sendiri. Karena itu, diharapkan bisa menjadi solusi dari permasalahan. 2) Pola sistematis dalam rangkaian kegiatan dan program harus selalu dicantumkan dalam kebijakan. Akibatnya, dapat dilihat dalam kegiatan perencanaan program yang memiliki hasil yang diinginkan dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi. Pada dasarnya, ini dapat mengungkapkan hubungan masalah. a) Langkah pertama adalah mengatasi setiap masalah yang terjadi untuk menyelesaikan penyelesaian kebijakan untuk kepuasan semua orang. b) Aspek kedua dari program yang berhubungan dengan pemecahan masalah tertentu dan akhir masih jarang. Dalam hal ini, peraturan mungkin perlu ditulis ulang untuk menyeimbangkan transfer kekuasaan, atau mungkin tidak berlaku lagi untuk dieksekusi. c) Ketiga, kebijakan pasti akan berubah saat diimplementasikan. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi jalannya kebijakan yang tidak relevan dengan program yang dibuat secara prosedural. d) Keempat, kebijakan publik di satu bidang akan selalu dikaitkan dengan kebijakan publik di bidang lain. Dalam skenario ini, Indonesia membutuhkan kebijakan yang terkait satu sama lain untuk menghilangkan aktivitas non-prosedural. 3) Pada umumnya kebijakan publik harus mempunyai hubungan dengan hukum dan akibat pidana agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap norma-norma kebijakan yang telah ditetapkan, dan agar masyarakat terpaksa mengikuti peraturan tersebut karena mengandung sanksi pidana.

2.1.1 Pembangunan berkelanjutan

Selanjutnya, gagasan pembangunan berkelanjutan dimanfaatkan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Batam yang concern dengan isu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan

didefinisikan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, sebagai pembangunan yang melayani tuntutan generasi sekarang tanpa membahayakan kebutuhan generasi mendatang. Brundtland report (1987), dalam Sudirman (2019) mendefinisikannya dalam tiga dimensi: ekonomi, sosial, dan lingkungan, Pertama, dengan melihat aspek sosial dari pembangunan berkelanjutan. Bagian ini berfokus pada pembangunan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia, serta pembangunan kesehatan, program Indonesia pintar, kemiskinan, dan kesetaraan gender. Kedua, mencakup kajian aspek ekonomi dari pembangunan jangka panjang. Bagian ini melihat keterlibatan sektor pertanian dalam pertumbuhan jangka panjang. Sementara itu, bagian ketiga berisi kajian tentang faktor lingkungan, yang melihat bagaimana pemerintah daerah menghadapi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

2.1.2 Tahapan Kebijakan Publik



Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik (Batubara & Manurung, 2020)

Menurut (Batubara & Manurung, 2020) terdapat enam Tahapan Kebijakan, yaitu: 1) Agenda Setting, Beberapa di antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyusunan agenda kebijakan publik (Hernimawati et al., 2017) adalah: a) Perkembangan sistem pemerintahan yang demokratis, b) Sikap pemerintah dalam proses penyusunan agenda, c) Bentuk pemerintahan atau realisasi otonomi daerah, d) Partisipasi masyarakat. 2) Formulasi, Formulasi masalah kebijakan merupakan pekerjaan yang sangat prinsipil dan krusial karena jika hanya berpusat pada masalah tersebut salah atau tidak benar, maka kebijakan publik yang akan diterapkan juga tidak benar. Mengkaji permasalahan publik dibutuhkan teori, informasi dan metodologi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi (Tumanggor, 2018). 3) Legitimasi Menurut (Nuryawan, 2019) Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat diterapkan.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu kosong, maka kekuatan para implementor dihadapan publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. 4) Implementasi Menurut Anggara (2012:159) Implementasi adalah proses konversi (*throughput*) yang mengubah *input* (kebijakan, tujuan, dan sarana) menjadi *output* dan *outcomes*. Persepsi, disposisi, dan kapabilitas para implementor akan sangat mempengaruhi saat suatu program dijalankan dan hasilnya pun akan berbeda-beda karena dijalankan oleh pelaksana kebijakan yang berbeda pula walaupun kebijakan berasal dari pusat namun pelaksanaan diserahkan pada masing-masing kepala daerah. 5) Evaluasi Menurut (Ramdhani & Ramdhani, 2017) Keberhasilan

implementasi kebijakan membutuhkan keterlibatan para *stakeholders* secara demokratis dan partisipatif. Para pemangku usaha dan pembuat kebijakan harus giat terlibat dalam menganalisis konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan. Oleh sebab itu, evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilaksanakan untuk melihat akuntabilitas dan peningkatan kinerja suatu kebijakan publik. 6) Terminasi Menurut (Oktavia et al., 2021) Tahapan terminasi adalah tahapan yang menyesuaikan kebijakan yang tidak dibutuhkan dengan keadaan. Berdasarkan artian tersebut terlihat bahwa proses kebijakan merupakan proses yang kompleks. Proses kebijakan ini menyangkut berbagai individu, kelompok dan masyarakat dengan psikologis dan lingkungan yang berbeda-beda. Maka dari itu tahapan ini perlu dilaksanakan dengan baik agar menghasilkan kebijakan yang proaktif dan *problem solving*.

2.1.3 Jenis Kebijakan Publik

Dalam Buku Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik (Mustari, 2015:39-40) menyebutkan pengelompokan jenis-jenis kebijakan sebagai berikut : pertama, yaitu *Substantive and procedural Policie*, *Substantive policy* dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, sedangkan *procedural policy* dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*policy stakeholders*), kedua ialah *Distributive, Redistributif, and Regulatory Policie*; a) *Distributive Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/ keuntungan kepada setiap individu, kelompok atau perusahaan. b) *Redistributive policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan atau hak-hak. c)

Regulatory Policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan atas perbuatan/ tindakan. Selanjutnya yang ketiga adalah *Material Policy*, Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/ penyediaan sumber-sumber material yang riil bagi penerimanya. Sedangkan yang keempat adalah *Public Goods and Private Goods Policies*. *Public goods policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pelayanan oleh pemerintah demi kepentingan orang banyak. *Private goods policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu/perorangan dengan imbalan biaya tertentu.

2.1.4 Implementasi Kebijakan

Pendapat Lester dan Stewart (Christianingsih, 2020) menjelaskan bahwa “Implementasi kebijakan dilihat secara luas dan memiliki makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja sama untuk melakukan kebijakan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan kebijakan ataupun program.”. Selain itu, Jones (Christianingsih, 2020) mengatakan bahwa 3 aktifitas utama yang terpenting dalam mencapai program implementasi kebijakan yaitu :a) Organisasi, pembentukan atau penataan sumber daya, unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. b) Interpretasi, agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. c) Penerapan, ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disamakan dengan tujuan program.

Penelitian (Winarno, 2014) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik menyatakan bahwa implementasi kebijakan ialah proses yang krusial atau sangat penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar dapat memiliki tujuan ataupun dampak yang dikehendaki.. Implementasi dicermati secara luas mempunyai maksud pelaksanaan Undang-Undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam usaha untuk mencapai atau meraih tujuan dari kebijakan atau program.

2.1.5 Model Implementasi Kebijakan

Model-model Kebijakan Publik; mempelajari sesuatu akan lebih gampang apabila menggunakan sebuah abstraksi dari realita. Begitu pula dalam mempelajari Ilmu Kebijakan Publik, berbagai model akan dipergunakan, yaitu model hasil dan dampak serta model proses kebijakan publik.

Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasinya, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut adalah: 1) Isi kebijakan mencakup: a) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, b) Jenis manfaat yang dihasilkan, c) Derajat perubahan yang diinginkan, d) Kedudukan pembuat kebijakan, e) Para pelaksana program, f) Sumber daya yang dikerahkan, 2) Konteks implementasinya: a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi peran yang terlibat. b) Karakteristik lembaga dan pemerintah. c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Model proses kebijakan publik menurut Chales O. Jones ada 11 tahapan dalam proses kebijakan publik, yang dimulai dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan *termination*. Adapun tahap-tahap tersebut sebagai berikut (Suwitri, 2016): 1) *Perception/definition*, mendefinisikan masalah adalah tahap awal dari proses kebijakan publik. Negara mempunyai tanggung jawab membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka *welfare state*. Mengakses kebutuhan tidaklah mudah, dibutuhkan sikap responsif, kepekaan terhadap perhitungan kebutuhan masyarakat. Masalah masyarakat (*public problems*) sangatlah kompleks, pembuat kebijakan sering disulitkan untuk membedakan antara masalah dan akibatnya. 2) *Aggregation*, tahap mengumpulkan orang-orang yang mempunyai pemikiran sama dengan pembuat kebijakan. Dapat dijalankan melalui media massa, penelitian atau orasi. 3) *Organization*, mengorganisasikan orang-orang yang berhasil dikumpulkan tersebut ke dalam wadah organisasi baik formal maupun informal. 4) *Representation*, mengajak kumpulan orang-orang yang berpikiran sama pada suatu masalah untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah tersebut dapat diteruskan ke agenda *setting*. 5) *Agenda Setting*, terpilihnya suatu masalah ke dalam agenda *setting*. 6) *Formulation*, tahap ini merupakan tahap yang paling kritis, masalah dapat diartikan kembali dan mendapat solusi yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat tetapi merupakan kepentingan kelompok mayor dari para pembuat kebijakan. Hal ini disebabkan interaksi para pembuat kebijakan baik sebagai individu, kelompok serta partai yang dilakukan melalui negosiasi, *bargaining*, responsivitas dan kompromi dalam memilih alternatif.

Formulasi juga membahas siapa dan bagaimana cara melaksanakan output kebijakan. 7) *Legitimation*, proses pengesahan dari alternatif yang terpilih (*public policy decision making*). 8) *Budgeting*, anggaran yang disediakan untuk implementasi kebijakan. Kadang terjadi kasus ketika anggaran disediakan di tahap awal sebelum *perception*, atau sesudah implementasi. Ketersediaan dana juga mempengaruhi penyusunan skala prioritas. 9) *Implementation*, kebijakan publik yang sudah dilegitimasi siap dilaksanakan jika dana sudah disediakan, namun secara kasuistis kadang terjadi, kebijakan harus dilaksanakan sedangkan dana belum bisa dicairkan. 10) *Evaluation*, menilai hasil implementasi kebijakan, setelah menentukan metode evaluasi. Merupakan tahap untuk mencari faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong serta kelemahan dari isi dan konteks kebijakan itu sendiri. Evaluasi kebijakan membutuhkan bantuan proses *monitoring*. 11) *Adjustment/Termination*, tahap menyesuaikan kebijakan publik untuk menentukan perlunya direvisi ataukah diakhiri karena kebijakan telah selesai atau gagal total.

Model proses kebijakan publik menurut Harold Laswell, proses kebijakan publik disusunnya dengan lebih sederhana. Perbedaan rumusan Laswell terletak pada kedudukan evaluasi dan terminasi. Menurutnya terminasi dilakukan terlebih dahulu sebelum evaluasi dengan pemahaman terminasi adalah tahap penyesuaian kebijakan dengan kelompok sasaran dan evaluasi adalah tahap perbaikan (Suwitri, 2016).

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat 6 variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik (Agustino, 2016), yaitu: i)

Standard dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan, kinerja implementasi kebijakan dapat dilihat dari tingkat keberhasilannya hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksanaan kebijakan. ii) Sumber Daya Keberhasilan, proses implementasi kebijakan bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia, waktu dan sumber daya *financial* adalah bentuk dari sumber daya tersebut. iii) Karakteristik Agen Pelaksana, pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Hal ini banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. iv) Sikap/Kecendrungan (*Disposition*), sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana banyak mempengaruhi kesuksesan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. v) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Agen Pelaksana, pengkoordinasian merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi antar pihak-pihak yang ikut terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya akan sangat kecil untuk terjadi. vi) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, kondisi ekonomi, sosial dan politik yang kondusif banyak mempengaruhi kesuksesan suatu implementasi kebijakan. Begitupun sebaliknya.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan pejabat/ lembaga pemerintah dalam menyediakan sarana untuk pelaksanaan program yang sudah ditetapkan sehingga program tersebut menimbulkan dampak terhadap tercapainya tujuan.

2.1.6 Indikator Implementasi Menurut George C. Edward III

Menurut George C. Edward III berpendapat ada 4 indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan (Djiwandono, 2017), yaitu :

1) Komunikasi adalah faktor utama yang mempengaruhi kemampuan suatu kebijakan untuk diimplementasikan dengan sukses. Dia mengklaim bahwa komunikasi yang efektif juga mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan implementasi kebijakan publik. Ketika pengambil keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan, implementasi menjadi efektif. Tiga indikator berikut dapat digunakan (atau digunakan) untuk mengukur efektivitas faktor-faktor komunikasi yang disebutkan di atas: a) Transmisi; menyalurkan komunikasi yang efektif juga dapat menghasilkan implementasi yang efektif. Kesalahpahaman sering terjadi akibat distribusi komunikasi; Hal ini antara lain disebabkan oleh pesan yang telah melalui berbagai lapisan birokrasi, sehingga menyebabkan apa yang diharapkan menjadi bengkok di tengah jalan. b) Kejelasan; informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) perlu dapat dipahami dan bebas dari ambiguitas. Meskipun ketidakpastian kebijakan tidak selalu membuat implementasi menjadi sulit, beberapa tingkat fleksibilitas diperlukan dari pihak pelaksana. Namun, di tingkat lain, ini sebenarnya akan membelokkan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. c) Konsistensi; arahan yang dikeluarkan dalam melaksanakan suatu komunikasi harus konsisten dan dapat dimengerti (untuk dilaksanakan atau dilaksanakan). Karena mungkin akan membingungkan bagi pelaksana lapangan jika perintah sering diberikan.

2) Sumber daya, juga dikenal sebagai faktor kedua, yang menentukan apakah suatu kebijakan berhasil diimplementasikan. Indikator sumber daya terdiri dari berbagai komponen, antara lain: Staf adalah sumber daya utama yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Jumlah pegawai dan pelaksana saja tidak cukup; juga, perlu ada cukup orang yang kompeten dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan dalam kebijakan atau dalam pelaksanaannya. b) Informasi; Saat menerapkan kebijakan, informasi dapat mengambil salah satu dari dua bentuk. Jenis informasi pertama berkaitan dengan proses implementasi kebijakan. Jika diberi arahan untuk bertindak, pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan. Kedua, data seberapa baik pelaksana mematuhi undang-undang dan peraturan lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Para pelaksana kebijakan harus mengetahui adanya kepatuhan hukum oleh pihak lain. c) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

Legitimasi atau kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan yang dipilih secara politik dikenal sebagai otoritas. Ketika tidak ada otoritas, publik tidak mengakui kekuatan pelaksana, yang memungkinkan mereka untuk menghalangi proses implementasi kebijakan. Namun, dalam pengaturan yang berbeda, di mana otoritas formal seperti itu ada, kesalahan sering terjadi ketika menilai kemanjurannya. Di satu sisi, efektivitas wewenang diperlukan untuk mewujudkan kebijakan, tetapi di sisi lain efektivitas akan berkurang jika para pelaksana menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kepentingan organisasinya. d) Fasilitas, Fasilitas fisik berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan tidak dapat berhasil dilaksanakan tanpa adanya fasilitas

pendukung (infrastruktur), sekalipun pelaksana memiliki cukup banyak orang, tahu apa yang harus mereka lakukan, dan diberi wewenang untuk melakukannya. Aspek krusial ketiga tentang bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan adalah sikap.

3) Disposisi, atau perilaku sebagai faktor ketiga merupakan pelaksana suatu kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya harus tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus mampu mencapainya, agar tidak ada prasangka dalam praktik nyata, agar suatu kebijakan menjadi efektif. Dalam variabel disposisi ini yang perlu diperhatikan adalah: a) Pengangkatan birokrat; karakter atau pandangan mereka. Oleh karena itu, mereka yang berkomitmen pada kebijakan yang telah ditetapkan, terutama untuk kepentingan warga negara, harus dipilih dan diangkat untuk menduduki posisi pelaksana kebijakan. b) Insentif: Manipulasi insentif adalah salah satu solusi yang direkomendasikan untuk masalah kecenderungan pelaksana. Karena orang sering bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, pembuat kebijakan dapat memanipulasi insentif untuk mempengaruhi bagaimana pelaksana kebijakan berperilaku. Ini mungkin menjadi faktor yang membantu pelaksana kebijakan mengikuti arahan dengan meningkatkan beberapa keuntungan atau biaya. Dalam upaya untuk memajukan tujuan pribadi atau organisasi, hal ini dilakukan.

4) Struktur Birokrasi, merupakan faktor keempat yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan pemerintah diimplementasikan. Ketika struktur birokrasi tidak sesuai dengan kebijakan yang ada, maka distribusi sumber daya menjadi

tidak efektif, yang akan menghambat kemajuan kebijakan. Kebijakan yang begitu kompleks membutuhkan partisipasi banyak orang.

Birokrasi yang menjalankan kebijakan harus mampu mendukung yang telah dipilih secara politik dengan bekerja sama dengan baik. Menerapkan Fragmentasi dan mengikuti *Standar Operating Procedures* (SOP) adalah dua sifat yang dapat meningkatkan efisiensi struktur organisasi/birokrasi. SOP adalah prosedur reguler yang memungkinkan anggota staf (atau pelaksana kebijakan, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dipersyaratkan oleh warga). Fragmentasi dilakukan sebagai upaya untuk membagi pertanggung jawaban kegiatan pegawai di antara beberapa kelompok kerja.

2.1.7 Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Implementasi

Dalam proses pelaksanaan penanganan sampah, tidak jarang pemerintah menemui beberapa hambatan-hambatan. Hambatan tersebut menurut Edward III dapat dikategorikan dalam dua jenis. Yang pertama ialah hambatan yang bersifat internal. Hambatan ini tidak terlepas dari masalah organisasi atau masalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah institusi. Sedangkan hambatan eksternal ialah yang dilakukan oleh pemerintah dari segi fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah. Terdapat 3 faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi, diantaranya:

1. Sumber daya, Suatu organisasi, baik itu perusahaan maupun institusi, bahkan tidak lepas dari sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Kemajuan bisnis juga sangat ditentukan oleh SDM. Pada hakikatnya sumber daya manusia adalah

orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuannya.

2. Sarana prasarana, Prasarana persampahan, disebut juga prasarana, merupakan bangunan dasar yang dapat mendukung instalasi operasional pengolahan sampah.

Sarana Persampahan, yang juga disebut sarana, adalah peralatan yang dapat digunakan dalam kegiatan pengolahan sampah.

3. Kesadaran Masyarakat, Kesadaran masyarakat adalah pemahaman tentang apa yang telah atau harus dilakukan seseorang untuk membuat kehidupan sosial berfungsi sesuai dengan norma yang diterima untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

2.2 Sampah sebagai masalah Pemerintah Daerah

Menurut Habiya (2019) Sisa produk atau barang yang tidak dibutuhkan lagi dianggap sampah. masyarakat saat ini sedang mencari solusi dalam penanganan masalah sampah. Jumlah, bentuk, dan ciri sampah semakin meningkat, dan semakin bervariasi sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat (Habiya, 2019). Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah dan masyarakat harus sangat berhati-hati dalam mengatasi krisis sampah saat ini. Dikhawatirkan praktik pengelolaan sampah yang tidak tepat akan berdampak buruk, seperti penurunan kualitas lingkungan, yang juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat.

Dalam peraturan daerah kota Batam No. 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah Pahnla et al., (2018) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah

spesifik. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus (Pahnla et al., 2018).

2.2.1 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kota Batam dikelola oleh tiap-tiap kecamatan berdasarkan peraturan daerah No. 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Proses pembuangan tempat sampah terakhir menggunakan metode *controlled landfill*. Namun saat ini pemerintah Kota Batam sedang gencar menangani masalah sampah yaitu dengan mendirikan bank sampah. (Manalu & Purba, 2020).

Bank sampah merupakan tempat penyimpanan berbagai jenis sampah. Sampah yang disimpan di bank sampah adalah sampah yang memiliki nilai ekonomis. Secara umum, bank sampah beroperasi sama dengan bank lain, dengan pelanggan, pembukuan, dan manajemen. Namun, tidak seperti bank lain yang biasanya kita ketahui bahwa nasabah menyetor uang, bank sampah malah menerima sampah yang bernilai ekonomis, dengan pengelola bank yang mengawasi prosesnya. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sampah perlu inventif, kreatif, dan berwirausaha. Sistem pengelolaan sampah berbasis rumah tangga bank sampah memberikan kompensasi kepada orang-orang untuk memilah dan menyimpan sejumlah sampah.

2.3 Sampah dan Tata Kelola perkotaan

Salah satu penyebab terjadinya bencana alam seperti banjir adalah pengelolaan sampah yang tidak efisien. Untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah, kesadaran masyarakat harus ditumbuhkan. Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan yang muncul di lingkungan pemukiman.

Menurut pengamatan yang dilakukan di Batu Aji, Batam, budaya pengelolaan sampah masih belum optimal. Salah satunya adalah pemanfaatan lingkungan yang kurang kompetitif saat mengadopsi metode 3R dalam pengelolaan sampah. Pendekatan 3R adalah jenis kegiatan produktif yang melibatkan pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi/komersial (daur ulang). Berdasarkan temuan pengembangan pengelolaan sampah yang sedang berlangsung dengan teknik 3 R (*Reduce, Reuse, dan Rcycle*) di kelurahan Kibing, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat sekitar tumbuh sebagai akibat dari paparan materi tim pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat cukup termotivasi untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan memberikan nilai lebih bagi daerah sekitarnya. Kesimpulan lainnya adalah perlu adanya penyuluhan tambahan, misalnya kepada sasaran yang berbeda seperti anak muda untuk membiasakan pemilahan sampah yang baik dan benar, dan kepada ibu-ibu agar dapat memanfaatkan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah (Siyamto, 2021).

2.3.1 Manajemen Sampah saat ini

Batam merupakan negara kepulauan dengan 400 pulau dan berpenduduk 1,2 juta jiwa. Tentunya hal ini akan memberikan tekanan terhadap lingkungan, salah satunya adalah sampah yang dihasilkan. Di Batam, timbunan sampah melebihi 1.000 ton per hari, dengan sekitar 80 persen di antaranya dikelola di TPA Telagapungur dengan menggunakan metode *controlled landfill*. Saat ini, lebih dari separuh luas lahan TPA Telagapungur sedang digunakan. Karena keterbatasan lahan, diperlukan pengelolaan sampah yang baik, termasuk upaya

pengurangan sampah, karena *volume* sampah yang masuk terus meningkat drastis. Manfaat terbesar di masa depan adalah untuk kegiatan pengelolaan lingkungan jangka panjang. Khususnya dalam hal pengelolaan sampah. Selanjutnya, untuk menjaga Batam tetap bersih dan asri. Sehingga cita-cita Batam menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan Indonesia dapat terwujud (MEDIACENTER, 2020).

2.3.2 Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam

Dalam Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2013 pasal 11 dipaparkan bahwa setiap pengelola Kawasan pemukiman, industri, komersil dan Kawasan failitas lainnya harus memiliki fasilitas pemilahan sampah berdasarkan jenisnya Pasal 11 menyebutkan bahwa : 1) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah berdasarkan sifat/ jenis sampah. 2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memilah sampah dari sumbernya sebelum diangkut ke TPS dan/ atau TPS 3R. 3) Fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada Standar Teknis Pemilahan Sampah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pengertian “kawasan permukiman” berikut ini didasarkan pada isi Pasal 11 Ayat 1 : a) Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan di luar kawasan lindung, baik perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan pemukiman atau perkampungan. lingkungan tempat tinggal dan tempat beraktivitas. yang mendukung penghidupan dan penghidupan. b) Istilah "kawasan komersial" mengacu pada berbagai tempat, termasuk pusat perdagangan, pasar,

toko, hotel, kantor, tempat makan, dan tempat hiburan. c) “Kawasan industri” adalah tempat terkonsentrasinya kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dibuat dan dikuasai oleh pelaku usaha kawasan industri yang memiliki izin usaha. d) Kawasan unik yang digunakan untuk kepentingan nasional dalam skala nasional, seperti kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi, adalah yang dimaksud dengan "kawasan khusus". e) Fasilitas umum meliputi hal-hal seperti halte, stasiun kereta api, pelabuhan laut, bandara, terminal angkutan umum, taman, dan trotoar. f) Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” meliputi tempat ibadah, panti asuhan, dan tempat-tempat lain semacam itu. g) Yang dimaksud dengan “Fasilitas Lainnya” adalah tempat-tempat yang tidak bersifat komersial, industri, khusus, sosial, umum, termasuk fasilitas tahanan, penjara, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga. Serta sesuai dengan isi pasal 12 sampai pasal 15 tentang pengelolaan sampah dan pengurangan sampah, dan pasal 38 sampai pasal 39 tentang petugas kebersihan dan perizinan bagi pihak usaha.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Yayan (2019)	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi kurang baik. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya ketersediaan perlengkapan/fasilitas pendukung.
2	Putri Ina Desih Sinaga (2017)	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan)	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah belum maksimal dilakukan • masyarakat masih membuang sampah diluar jam pembuang sampah. • masih kurangnya pemahaman tentang lingkungan yang bersih dan sehat. • kurangnya sumber daya
3.	Maulidyka, Daud, Stefanus (2017)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan cukup mendukung terlaksananya kebijakan,

		Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado		<ul style="list-style-type: none"> • Tetapi TPA tidak memadai dan sikap para pelaksana dalam program mempunyai kemauan serta keinginan untuk melaksanakan program • dan yang masih terkendala adalah masyarakat yang kurang sadar terhadap pembayaran retribusi.
4.	Habiya (2019)	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah yang baik Perspektif Mashlahah di Kabupaten Sumenep	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sampah belum optimal karena masyarakat belum ada kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. • Ada/tidaknya aturan tidak memberi efek bagi masyarakat.
5.	Muhamad Rizki (2019)	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah.	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • pengelolaan sampah, yaitu melakukan sosialisasi 3R secara intensif kepada kelompok masyarakat yang melibatkan <i>stakeholder-stakeholder</i> terkait.

6.	Tri Yudianto, Prabang Setyono, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, (2021)	Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi pengelolaan sampah berjalan baik • implementasi pengelolaan sampah ini meliputi retribusi, sumber timbunan sampah, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan tempat pemrosesan akhir. • masyarakat puas terhadap pelayanan pengelolaan sampah dengan indeks kepuasan sebesar 86,858.
7.	Yulianto Mokodompis, Markus Kaunang, Ventje Kasenda (2019)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan kebersihan atas sampah di jalan umum (protokol) pengangkutan dan pembuangan atas sampah dari tempat dan fasilitas umum • Pemeliharaan kebersihan atas sampah di pasar, pengangkutan dan pembuangan ke TPA • Pengaturan dan penetapan lokasi TPS dan TPA Pengangkutan sampah dari TPS

				ke TPA
8.	Denny Ardiansyah Pribadi, Lubna Salsabila (2021)	How does the Government Manage Waste? Analysis of Waste Management in Bantul Regency, Indonesia	Qualitative research	<ul style="list-style-type: none"> waste management by the Bantul Regency Government. However, in practice, the contribution is still minimal. increase in the amount of waste generated. With a population of 974,211 people in Bantul Regency (as of 2019), has generated a lot of waste generation.
9.	Verawati & Retnowati Wahyuning, (2020)	Policy Implementation of Solid Waste Management in South Jakarta	qualitative approach with descriptive method	<ul style="list-style-type: none"> The implementation of Waste Management in South Jakarta has not been carried out properly. The obstacle that hinders the implementation of waste management is the lack of communication between the local government and the community. In addition, the socialization of policies only at the sub-district level but not at the environmental

				level by the government.
--	--	--	--	--------------------------

Penelitian terdahulu dapat dijadikan pedoman bagi penulis untuk meningkatkan penggunaan teori dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penulis menggunakan berbagai penelitian terdahulu sebagai referensi untuk membantu pemahaman penulis. Ada berbagai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Yayan (2019) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah kendalanya dapat dilihat dari Organisasi kurang baik dan belum maksimalnya ketersediaan perlengkapan/fasilitas pendukung.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Putri Irna Desih Sinaga (2017) yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Pengelolaan sampah belum maksimal dilakukan, masyarakat masih membuang sampah diluar jam pembuang sampah. Masih kurangnya pemahaman tentang lingkungan yang bersih dan sehat. kurangnya sumber daya.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Maulidyka, Daud, Stefanus, (2017) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Kecamatan cukup mendukung terlaksananya kebijakan, Tetapi TPA tidak memadai dan sikap para pelaksana dalam program mempunyai kemauan serta keinginan untuk melaksanakan program, dan yang masih terkendala adalah masyarakat yang kurang sadar terhadap pembayaran retribusi.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Habiya (2019) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah yang baik Perspektif Mashlahah di Kabupaten Sumenep Habiya. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Pengelolaan Sampah belum optimal karena masyarakat belum ada kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Ada/tidaknya aturan tidak memberi efek bagi masyarakat.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Rizki (2019) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan sampah, yaitu melakukan sosialisasi 3R secara intensif kepada kelompok masyarakat yang melibatkan *stakeholder-stakeholder* terkait.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Tri Yudianto, Prabang Setyono, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani (2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi pengelolaan sampah berjalan baik, implementasi pengelolaan sampah ini meliputi retribusi, sumber timbunan

sampah, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan tempat pemrosesan akhir. Masyarakat puas terhadap pelayanan pengelolaan sampah dengan indeks kepuasan sebesar 86,858.

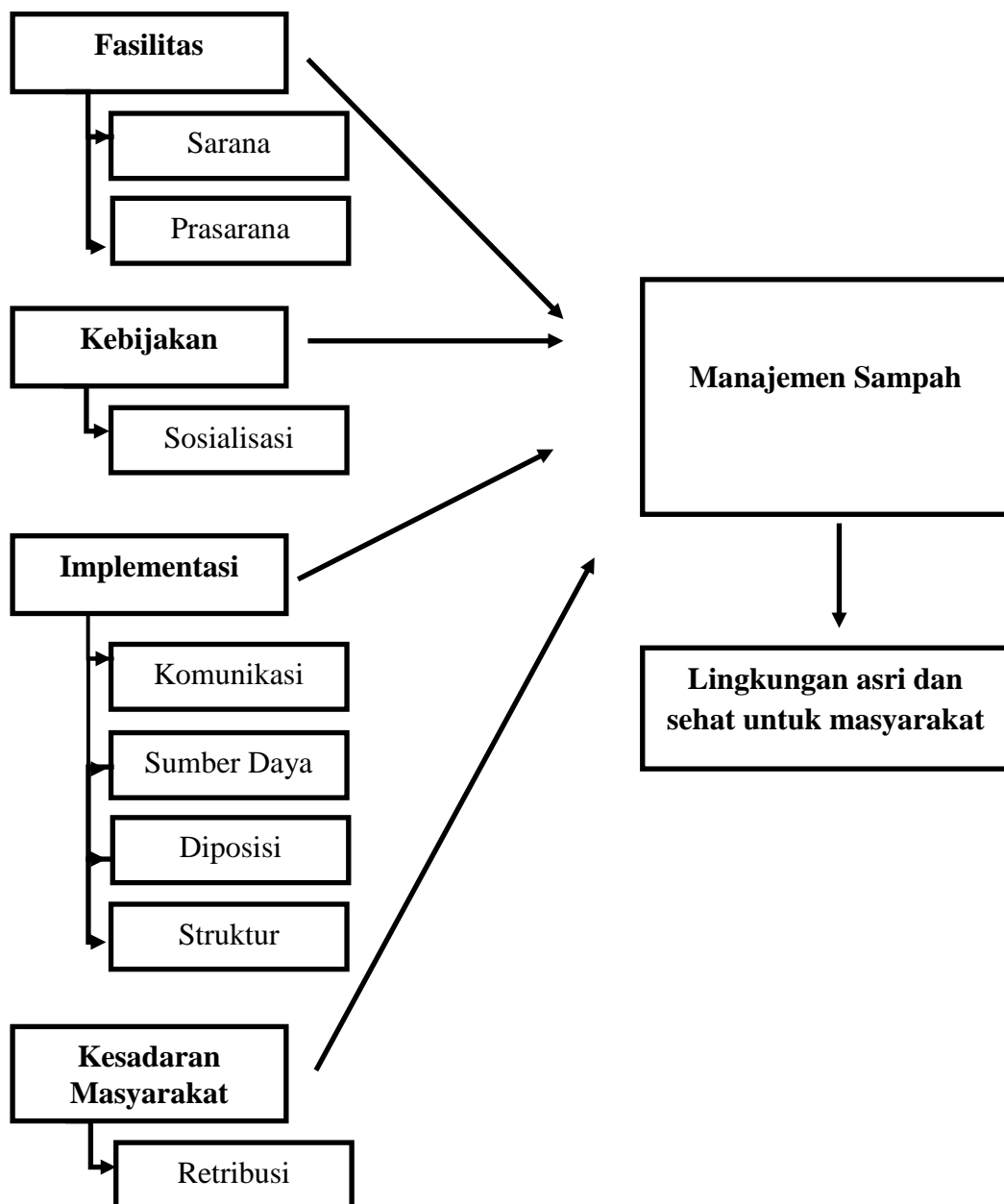
Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto Mokodompis, Markus Kaunang, Ventje Kasenda, (2019) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Pemeliharaan kebersihan atas sampah di jalan umum (protokol) pengangkutan dan pembuangan atas sampah dari tempat dan fasilitas umum. Pemeliharaan kebersihan atas sampah di pasar, pengangkutan dan pembuangan ke TPA. Pengaturan dan penetapan lokasi TPS dan TPA Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan Denny Ardiansyah Pribadi, Lubna Salsabila (2021) yang berjudul How does the Government Manage Waste? Analysis of Waste Management in Bantul Regency, Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu waste management by the Bantul Regency Government. However, in practice, the contribution is still minimal. Increase in the amount of waste generated. With a population of 974,211 people in Bantul Regency (as of 2019), has generated a lot of waste generation.

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan Verawati & Retnowati Wahyuning, (2020) yang berjudul Policy Implementation of Solid Waste Management in South Jakarta. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu The implementation of Waste Management in South Jakarta has not been carried out properly. The obstacle that hinders the implementation of waste management is the lack of communication

between the local government and the community. In addition, the socialization of policies only at the sub-district level but not at the environmental level by the government.

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Universitas Putera Batam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow (dalam Sugiyono, 2017) Penelitian Kualitatif berkaitan dengan tindakan mendalami masalah kemudian dipecahkan melalui wawancara dan observasi secara detail serta membuat penguraian dan penjelasan masalah yang akan diteliti. Selain itu, penelitian kualitatif merupakan suatu proses kegiatan antar kelompok maupun individu dalam menilai suatu masalah baik itu masalah kelompok maupun masalah sosial. Dalam penelitian kualitatif peneliti melewati beberapa proses yaitu cara membuat pedoman wawancara kemudian melakukan pengumpulan data dari para informan, menganalisa data, serta memberikan pemahaman mengenai data yang akan dibuat.

3.2 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, kemudian peneliti memperoleh data-data dengan cara turun langsung kelapangan kemudian melakukan observasi dan wawancara langsung bersama para informan di kantor Dinas Lingkungan Hidup agar peneliti bisa mengkaji masalah yang diteliti. Hasil data yang diperoleh bersumber dari data primer yaitu wawancara dan observasi dilapangan dan data sekunder berupa data dari buku, artikel yang sesuai judul penelitian, dan penelitian terdahulu.

3.3 Lokasi Penelitian dan Periode Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Jl. Ir. Sutami, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29428, Indonesia. Peneliti memilih Dinas Lingkungan Hidup sebagai lokasi penelitian dikarenakan peneliti ingin fokus terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam.
2. Periode Penelitian

Tabel 3.1 Tabel Periode Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		Maret 2022	April 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022										
1	Studi pustaka	■	■	■													
2	Penyusunan proposal	■	■	■													
3	Pengumpulan Data		■	■	■												
4	Pengolahan data			■	■	■											
5	Analisa hasil Penelitian			■	■	■											
6	Penyusunan Laporan						■	■	■								
7	Penyerahan laporan									■	■	■					
8	Sidang hasil												■	■	■		

3.4 Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data yang digunakan sebagai berikut (Sugiyono, 2012) :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan yang berasal dari para informan dengan cara melakukan wawancara bersama informan.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang berasal dari situs resmi, maupun sumber data lainnya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2012), dalam melakukan pengumpulan data peneliti harus memperoleh data yang akurat sesuai prosedur yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan ketika mengumpulkan data. Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

pengamatan pada kondisi lapangan serta masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan melihat realita dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang valid atau fakta kebenarannya sehingga informasi tersebut dapat dimuat oleh peneliti.

Tabel 3.2 Daftar Narasumber Penelitian

No	Nama Narasumber	Jabatan
1	Faisal Novrieco	Kepala Bidang Persampahan
2	Muldiarman	Kasi Penanganan Sampah
3	Azhari	Pelayanan pengangkutan sampah
4	Enneli	Petugas Kebersihan
5	Pita Sari	Petugas Kebersihan
6	Hayani	Masyarakat

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, dengan cara dokumentasi berupa gambar serta alat rekam yang bertujuan untuk memperkuat fakta data yang terjadi dilapangan.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016: 344) bahwa analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data secara cermat dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya. Sehingga hasil penelitian dapat disebarluaskan dan mudah dipahami.

1. Data Collection (pengumpulan data)

Wawancara, observasi, dan dokumentasi semuanya digunakan dalam proses memperoleh informasi.

2. Data Reduction (Reduksi data)

Reduksi data merupakan analisis data dengan tujuan berfokus pada aspek yang paling penting. Lebih mudah bagi peneliti untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dari pekerjaan mereka karena data yang direduksi menawarkan gambaran yang jelas.

3. Data Display (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, data direduksi dan kemudian disajikan sebagai deskripsi.

4. Conclusion Drawing / Verification (penarikan kesimpulan/verfikasi)

Pada tahap akhir penelitian, peneliti menggunakan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

3.7 Keabsahan Data

Menurut Sugiyono menyebutkan beberapa uji validitas data kualitatif sebagai berikut (Sondak et al., 2019):

1. Uji Kredibilitas

Kriteria ini membantu untuk melakukan penyelidikan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan pada temuan dapat diperoleh, menampilkan tingkat kepercayaan pada temuan melalui pembuktian peneliti terhadap berbagai fakta yang diteliti.

2. Uji *Transferability*

Validitas eksternal, juga dikenal sebagai transferabilitas, dalam penelitian kualitatif mengacu pada tingkat kebenaran atau penerapan temuan penelitian terhadap populasi dari mana sampel diambil. Nilai transfer ini berkaitan dengan seberapa banyak temuan penelitian dapat digunakan atau diterapkan dalam konteks lain. Signifikansi transfer bagi peneliti naturalistik tergantung pada pengguna sehingga temuan studi dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan keadaan sosial. Oleh karena itu, peneliti harus memasukkan laporan yang menyeluruh dan dapat dipahami tentang temuan penelitian dalam laporan.

3. Pengujian *Depenability*

Depenability Keandalan disebut sebagai reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Jika orang lain dapat menduplikasi prosedur studi, itu dapat diandalkan. Uji *Depenability* dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mengaudit setiap langkah penyelidikan. Penelitian tidak dapat dipercaya

atau diandalkan jika prosedur penelitian tidak diikuti meskipun faktanya ada.

4. Pengujian *Konfirmability*

Uji objektivitas penelitian adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kuantitatif. Ketika temuan suatu penelitian diterima secara luas, penelitian tersebut dikatakan objektif. Uji konfirmabilitas dan uji depenabilitas dapat dijalankan secara bersamaan dalam penelitian kualitatif karena kesamaannya. Pengujian konfirmabilitas memerlukan evaluasi temuan penelitian dalam kaitannya dengan metodologi yang digunakan untuk menentukan apakah sesuai dengan persyaratan konfirmabilitas.



Universitas Putera Batam